Kementerian PPN/ Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA EMAS 2045

Data Terhubung, Layanan Lebih Tepat

Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Jakarta, 5 November 2026

Kompleksitas Data untuk Pembangunan



"Di tengah keberagaman data lintas sektor, Undang-Undang Satu Data Indonesia hadir sebagai orkestrator yang menyelaraskan dan mengintegrasikan data nasional untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, berkualitas, dan tepat sasaran."

Konsep Kebijakan Satu Data Indonesia

Data terstandar, terhubung dan dimanfaatkan bersama untuk pembangunan dan layanan publik

Kementerian PPN/ Bappenas
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
INDONESIA EMAS 2045

Kondisi Saat Ini

Data banyak, namun belum optimal

- **Belum akurat, mutakhir, dan terpadu**
- **Tersebar di berbagai instansi dan sistem**
- **Data dari berbagai sumber dan sektor**

KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Orkestrasi ekosistem dan tata kelola data nasional

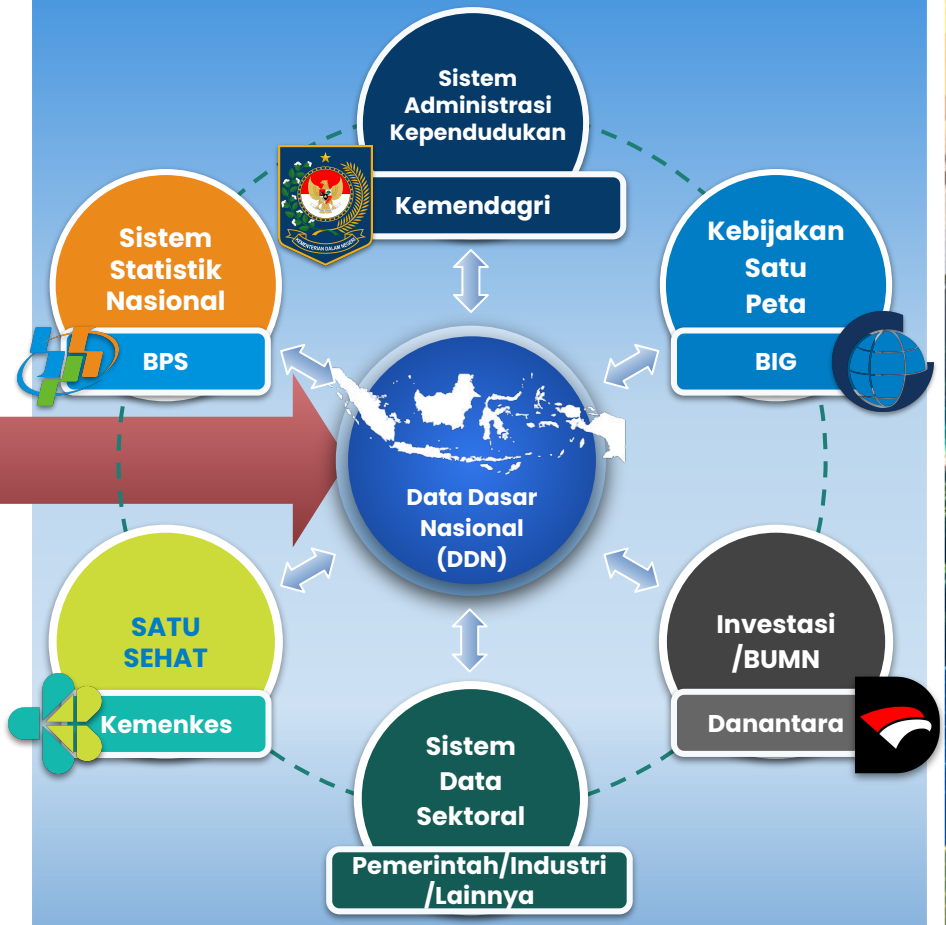
- **Standar Data & Metadata**
- **Kode Referensi dan/atau Data Induk**
- **Interoperabilitas Data**
- **Kualitas, Keamanan, dan Akses Data**

DATA DASAR NASIONAL (DDN)

Yang terstandar, akurat, dan mutakhir

"Tanpa memindahkan kewenangan Produsen Data"

PEMANFAATAN DATA



Manfaat untuk Bangsa dan Negara

Data untuk pelayanan masyarakat lebih akurat dan pembangunan lebih berdampak



Masyarakat input data sekali, *gak ribet*

Penyaluran bantuan lebih cepat tepat, *sat-set*

Sanggah dari masyarakat wajib direspon, *responsif*

Keterpaduan seluruh layanan pemerintah, *integrasi*

Masyarakat terlayani secara adil & merata, *inklusif*



Kementerian PPN/
Bappenas

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA EMAS 2045

Terima Kasih

Satu Nusa,
Satu Bangsa,
Satu Bahasa,
Satu Data Indonesia